

111

**HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td> <td style="width: 10%;">FEB</td> <td style="width: 10%;">MAR</td> <td style="width: 10%;">APR</td> <td style="width: 10%;">MEI</td> <td style="width: 10%;">JUN</td> <td style="width: 10%;">JUL</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>AGST</u></td> <td style="width: 10%;">SEPT</td> <td style="width: 10%;">OKT</td> <td style="width: 10%;">NOV</td> <td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	<u>AGST</u>	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	<u>AGST</u>	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 14																																												
TAHUN 2004																																												

# Nabiel Tuduh Korban Buyat Direkayasa

Menteri Kesehatan akui ada merkuri dalam tubuh warga Buyat.

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim menuding ada pihak yang merekayasa kebohongan publik dalam isu kasus pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara. "Salah satunya dilakukan satu dari empat warga Buyat yang datang ke Jakarta akhir Juli lalu," kata Nabiel dalam wawancara dengan *Tempo News Room* di Jakarta tadi malam.

Warga Buyat yang berbohong itu, menurut Nabiel, adalah Juri-ah, yang mengaku kesakitan saat melahirkan anaknya, Srifika karena ada benjolan ditubuhnya.

Menurut pengakuan masyarakat Buyat yang menyaksikan Juri-ah lewat TV, kata Nabiel, Srifika sesungguhnya anak angkat Juri-ah. "Saya punya rekamannya. Tidak hanya satu-dua orang yang mengatakannya," ujarnya sambil mengatakan, masyarakat setempat marah karena Juri-ah telah

berbohong. Nabiel menemui mereka Sabtu pekan lalu (7/8).

Rekayasa lainnya bisa diketahui dari keluhan Kepala Puskesmas Rataotok, Sandra Roti, yang kesulitan jika akan memeriksa warga setempat. Kepada dirinya, Sandra mengaku harus meminta lisensi dari LSM setempat untuk dapat memeriksa warga. Itu pun, katanya, selalu dihalang-halangi. "Ini kan tidak benar. Ini kan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi," dia menandaskan.

Nabiel juga menemukan fakta sebenarnya warga yang mengaku sakit karena pencemaran bukan penduduk asli Desa Buyat Pante. Mereka berasal dari daerah yang berjarak sekitar 150 km dari Teluk Buyat. "Mereka datang ke dusun itu karena di sana ada pengobatan gratis," katanya. Rasyid, salah satu warga Buyat yang datang ke Jakarta, katanya, juga bukan penduduk asli Buyat, melainkan warga kota Bitung. Dari fakta-fakta di lapangan ini, Nabiel yakin ada sesuatu yang disembunyikan.

Mengenai ikan benjol yang disuguhkan kepada dirinya, Nabiel mengatakan, diduga kuat ikan itu

benjol karena disuntik cairan tinta cumi-cumi. Ketika peristiwa itu terjadi, katanya, seorang ahli perikanan organoleptik sekaligus nelayan mengatakan kepadanya hal ini. "Saya juga punya rekamannya. Dia bilang kalau ikan sakit, bau, warna mata dan kulitnya akan berbeda. Itu adalah ikan sehat yang benjol," paparnya mengutip pernyataan ahli tersebut.

Nabiel mengakui adanya kandungan merkuri, arsen, dan antimon dalam tubuh warga Buyat yang diperiksa. Namun, katanya, itu belum tentu karena pencemaran oleh Newmont. "Bisa Newmont, bisa PETI, atau gabungan keduanya," ujarnya.

Atas dasar itu, Nabiel heran atas sikap sejumlah LSM yang dengan keras menuding Newmont harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Pemerintah sendiri, katanya, melihat ini sebagai masalah kesehatan masyarakat yang harus dicari solusinya dan tidak boleh ada yang disembunyikan. "Apa latar belakang kelompok-kelompok ini, kok banyak yang disembunyikan, tapi terus melakukan sensasi dengan membawa orang ke Jakarta," paparnya.

Tudingan Nabiel itu dibantah

keras Jane Pangemanan, aktivis dari Yayasan Suara Perempuan, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memediasi korban pencemaran Teluk Buyat. "Mana mungkin para nelayan memalsu data kasus Buyat, apalagi menyuntikkan ikan dengan tinta cumi," katanya tadi malam.

Jane dengan nada tinggi mengatakan, tuduhan Nabiel sangat tidak masuk akal. "Tuduhan yang norak, logikanya tidak ada, dan menunjukkan mereka tidak profesional," ujarnya sambil menunjuk hasil penelitian darah atas empat warga Buyat oleh Fakultas MIPA, Universitas Indonesia. Dari penelitian lembaga itu, katanya, terbukti dalam darah para korban terdapat kandungan merkuri di atas ambang normal.

Jane justru membalikkan tuduhan Nabiel. Menurut dia, mungkin saja tuduhan itu dilancarkan oleh pihak yang ingin mengadu domba masyarakat. Karena itu, ia berharap besok rombongan kedua korban Buyat sebanyak tujuh orang dapat membawa ikan-ikan yang benjol akibat tercemar merkuri.

Tudingan Nabiel lainnya bahwa dokter-dokter puskesmas se-

tempat dihalang-halangi LSM jika hendak memeriksa warga Buyat juga ditampik Jane. Menurut dia, para dokter di Puskesmas Pembantu Ratatotok bertanggung jawab pada Dinas Kesehatan. Sehingga, "Mereka tidak butuh izin dari LSM mana pun untuk bekerja," katanya.

#### **Merkuri di tubuh warga Buyat**

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi mengakui adanya kandungan merkuri di tubuh warga Buyat yang diperiksa di Jakarta. "Merkuri memang ada dalam tubuh mereka," ujarnya dalam sebuah seminar di Jakarta kemarin.

Namun, Sujudi mengaku belum menyimpulkan lebih lanjut soal temuan kadar merkuri oleh laboratorium Dinas Kesehatan Jakarta yang di atas ambang batas normal itu. "Masih harus diteliti lebih lanjut," katanya.

Menanggapi pengakuan Sujudi itu, pendiri LBH Kesehatan Iskandar Sitorus mengatakan, berarti Menteri mengakui bahwa itu bukan penyakit kulit. Ia menolak anggapan bahwa sumber masuknya merkuri ke dalam tubuh bisa melalui bahan kosmetik, cat, dan

batu-batuan alami. "Itu pasti karena pencemaran," katanya.

Kemarin Menteri Sujudi juga menemui Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar di Mabes Polri. Sujudi mengaku pertemuan itu tidak membahas kasus pencemaran di Teluk Buyat. "Saya dengan Kepala Polri ada urusan lain," katanya sesuai pertemuan dengan Kapolri.

Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Irfan Dadang Garnida mengatakan, Menteri Kesehatan sudah menunjuk Nyoman dari Departemen Kesehatan dan Direktur V Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri Brigjen Suharto untuk membicarakan kasus Buyat. "Nanti yang diberi kewenangan membahas masalah Buyat Nyoman dan Suharto," katanya.

Dadang mengakui adanya kesulitan dalam menangani kasus ini. Polri, menurut dia, berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. "Keterkaitannya banyak, koordinasi saja susah amat," paparnya.

● rina rachmawati/rr ariyani/  
martha warta-trn

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 22

TAHUN 2004

Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum

# Sejumlah LSM Ajukan Gugatan ke PT NMR

JAKARTA, (PR).-

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mengajukan gugatan "legal standing" kepada PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang telah terbukti melakukan sejumlah pelanggaran.

"Gugatan tersebut akan kami ajukan bulan depan," kata Pengkampanye Walhi, Radja Siregar, kepada pers yang bersama wakil LSM lainnya, yakni Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), Kontras dan Patal, di Jakarta, baru-baru ini.

Dasar gugatan, ujar Radja, adalah perbuatan pelanggaran hukum, pembohongan publik, dan pembiaran atas kerusakan lingkungan, serta penurunan kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan, Amdal PT Newmont Minahasa Raya (MNR) yang dikeluarkan Deptambem pada 1994 melanggar Kepmen LH No. 2 tahun 1988 tentang ambang batas pembuangan sedimen partikel yang tersuspensi yakni 200 mg per liter.

"Ambang batas yang diterapkan Indonesia termasuk longgar, padahal di AS ambang batasnya saja 50 mg per liter dan di Kanada 30 mg per liter," katanya.

Pada tahun 2000, KLH telah menyatakan sistem pembuangan tailing (limbah pertambangan-Red) adalah ilegal dengan mengeluarkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Newmont, antara lain limbah tailing yang dibuang ke Teluk Buyat dengan debit 5.000 meter kubik per hari dan harus memenuhi baku mutu antara lain arsen (As) dengan konsentrasi 0,5 mg per liter, serta air raksa (Hg) 0,008 mg per liter.

Selain itu, PT Newmont harus melakukan studi *ecological risk assessment* (ERA) yang melibatkan berbagai instansi antara lain antara Meneg LH, Gubernur Sulut, hingga perguruan tinggi dan tokoh masyarakat setempat yang harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan, dan harus melaporkan hasil studi ERA minimal satu kali sebulan.

Namun kenyataannya, ujar Radja, studi ERA yang dilakukan Newmont dilakukan sepihak, tidak melibatkan pengawasan pihak lain dan buangan tailingnya melewati ambang batas.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jatam, Siti Maemunah, mengatakan, tuntutan terhadap Newmont berupa pemulihan lingkungan, pemulihan kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.

Pihaknya juga meminta operasional PT NMR segera dihentikan, dan meminta pemerintah menindak tegas perusahaan atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

Selain itu, meminta pemerintah melakukan prinsip kehati-hatian dan meminta Newmont menghentikan pembuangan tailing ke laut yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) di Sumbawa bila diindikasikan hal serupa.

"Pihaknya juga meminta pemerintah melarang operasi pertambangan lain yang akan membuang tailingnya ke laut," ujarnya.

Sejumlah LSM tersebut juga menggugat Departemen Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan pembiaran terhadap berbagai kasus yang terjadi selama ini.

**Jangan buang ke laut**

Sementara itu, pemerintah diminta melarang metode *submarine tailings disposal* (STD) atau pembuangan tailing (bijih sisa atau limbah tambang) ke laut bagi semua operasi pertambangan, karena terbukti berbahaya dan telah banyak dilarang di berbagai negara.

"Metode pembuangan limbah ini kontroversial di dunia, dan sudah dilarang di banyak negara asal perusahaan pertambangan, seperti AS, Kanada, dan Australia," kata Direktur Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, kepada pers yang juga dihadiri wakil dari Walhi, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), Kontras dan Patal, di Jakarta, Kamis (5/8).

Siti mengatakan, dalam kasus PT Newmont Minahasa Raya (NMR) telah dapat terlihat dampak dari tailing terhadap biota laut, dan akhirnya juga berdampak kepada masyarakat.

Dalam STD, tailing disalurkan dari tambang ke pinggir laut dan melalui pipa ditumpahkan ke dasar laut, dan tailing seringkali beracun di mana arus bisa menyebarkan dan bisa merusak lingkungan hidup.

Sejak 1996, melalui Amdal yang dikeluarkan Deptambem pada 1994, PT NMR membuang tailingnya sebanyak 2.000 ton per hari ke laut, dan sudah berkali-kali pipa Newmont tersebut pecah dan menyebabkan kematian ikan secara massal.

"Tercatat pada 1996 ada delapan kali kematian ikan, pada 1997 enam kali, dan pada 1998 masyarakat mulai merasakan berbagai keluhan di tubuhnya. Jadi, bagaimana mungkin tidak ada hubungannya antara kematian ikan, dan penyakit masyarakat dengan tailing mereka," ujarnya.

Sayangnya, ungkap Siti, di tengah kontroversi tersebut, ada lima rencana STD baru di Indonesia yakni Asia Pasific Nikej, PT Meares Sopotan Mining, PT Weda Bay Nikel, PT Jember Metal/Banyuwangi Metal dan Ingold Maluku Satu.

Secara teori dalam operasi STD, tailing mengalir secara lancar dari mulut pipa langsung ke dasar laut, tetapi kenyataannya bagian yang cukup besar dari aliran tailing tersebut tercecce dan membentuk campuran air, serta tailing yang mengambang berbentuk awan dan bisa menyebar serta kembali ke permukaan laut.

Jika limbah tambang itu menumpuk di dasar laut, juga belum tentu menetap di situ karena hampir pasti arus dasar akan menyebarkan tailing. STD, ujarnya, semakin sering dipakai oleh negara-negara kaya dalam operasinya di negara berkembang, di mana perusahaan tersebut bisa mengelak hukum pelestarian alam dan tanggung jawab terhadap masyarakat setempat.

Perusahaan tambang terbesar di dunia seperti Newmont (AS), Placer Dome (Kanada), Rio Tinto (Inggris/Australia) dan BHP (Australia) berpusat di negara-negara kaya yang melarang STD, tetapi mereka mengoperasikan atau merencanakan STD di tambangnya di kawasan Asia Pasifik.

Perusahaan tambang Newmont, penghasil emas nomor dua di dunia, beroperasi di Sulawesi Utara melalui anak perusahaannya PT NMR (80 persen milik Newmont yang berpusat di Colorado, AS).

Sejak 1996, PT NMR menyalurkan tailingnya dari tambang ke pantai, dan dari sana 800 meter lepas pantai melalui pipa ke Teluk Buyat di mana tailing dibuang pada kedalaman 82 meter. (Ant)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 7																																												
TAHUN 2004																																												

## Ahli dari Jepang pelajari kasus Teluk Buyat

JAKARTA (Bisnis): Depkes atas bantuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendatangkan Mineshi Sakamoto, epidemiolog dari National Institute for Minamata Disease Jepang, untuk meneliti kasus Teluk Buyat.

Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Lingkungan (PPM & PL) Depkes Umar Fahmi kemarin mengatakan Sakamoto sudah berada di Indonesia sejak 1 Agustus.

Mulai Minggu ahli penyakit minamata dari Jepang itu sudah berangkat ke Desa Buyat, didampingi *senior environment WHO Jan Speets*, dan ahli kesehatan lingkungan Depkes.

Di Desa Buyat ahli tersebut akan melakukan evaluasi terhadap semua hasil pemeriksaan dan memberi masukan untuk metodologi epidemiologi dan kesehatan lainnya.

"Dia juga akan mengambil sampel ikan, air, darah, rambut, dan kuku masyarakat setempat untuk diperiksa di laboratorium Jepang," ujarnya kemarin.

Menyanggung biaya pengobatan warga Desa Buyat Pante yang tengah berobat di Jakarta, Fahmi menjelaskan pendanaan akan dibantu Depkes yang meliputi biaya hidup, pengobatan dan perawatan di RS pemerintah serta tiket pesawat terbang pergi pulang.

Dia meminta agar warga Buyat lainnya untuk tidak ke Jakarta karena Depkes telah mendatangkan dokter spesialis dari berbagai keahlian, dan tenaga ahli lainnya ke wilayah tersebut guna memberikan pengobatan dan pemeriksaan di Puskesmas Ratatotok dan RS Kab. Minahasa Selatan.

Sementara itu Menkes Ahmad Sujudi dan Kapolri Da'i Bachtiar segera membentuk tim teknis guna menyelidiki kasus pencemaran merkuri di Teluk Buyat.

"Salah satu hasil pertemuan adalah penunjukan koordinator tim teknis Depkes, dokter Nyoman yang akan melakukan penyelidikan dan membuat berita acaranya," kata Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Dandang Garnida.

Dia menjelaskan hasil pertemuan antara Menkes dengan Kapolri menyepakati bahwa tim teknis Depkes akan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat kepada tim penyidik Polri yang menangani kasus tersebut.

"Nanti kewajiban Polri untuk membuat berita acara pemeriksaan tentang hasil penyelidikan tersebut karena ini untuk pro justitia."

### Koordinasi

Teknis penyelidikan kasus Buyat, menurut dia, dibantu koordinator tim Depkes dengan Direktur VI Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Suharto.

Namun Menkes membantah pertemuannya dengan Kapolri untuk membahas kasus Teluk Buyat.

"Saya dengan Kapolri ada pertemuan lain. Banyak kerja sama yang dilakukan Depkes dan Polri," paparnya. Menurut Dadang, kasus Teluk Buyat bukan hanya persoalan polisi melainkan juga masalah nasional, sehingga perlu penyelesaian secara menyeluruh.

Dia membantah kasus pencemaran lingkungan Buyat yang merusak kesehatan penduduk setempat lambat ditangani. "Masalah tersebut harus ditangani secara keseluruhan oleh tim terpadu."

Wakaba Reskrim itu menyesalkan banyak kalangan melontarkan pernyataan yang berbeda dengan anggota tim terpadu yang menangani kasus tersebut. Padahal penyelesaian kasus ini dapat dilakukan secara efektif, katanya. (et/yr)

45

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH FORUM  
 INVESTOR IND.

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2004

## Depkes Datangkan Ahli "Minamata" dari Jepang ke Buyat

JAKARTA, KOMPAS — Guna menuntaskan isu penyakit minamata di Desa Buyat Pante, Kabupaten Minahasa Selatan-Sulawesi Utara, Departemen Kesehatan (Depkes)—difasilitasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)—mendatangkan dr Mineshi Sakamoto PhD, ahli epidemiologi dari National Institute for Minamata Disease Jepang untuk melakukan penyelidikan di Buyat.

Kehadiran Sakamoto di Buyat sampai 11 Agustus mendatang, menurut Dirjen Pembeantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Umar Fahmi, untuk melakukan *review* dan evaluasi atas semua hasil pemeriksaan sampel yang

pernah diambil oleh tim sebelumnya. "Selain memberi masukan mengenai metodologi epidemiologi dan soal kesehatan lainnya, ia juga akan mengambil sampel ikan, air, darah, rambut, dan kuku untuk diperiksa di laboratorium Jepang," kata Umar Fahmi di Jakarta, Senin (9/8).

Saat ini, Sakamoto yang tiba di Indonesia 5 Agustus lalu sudah berada di Buyat. Mantan Chief of Survey Section Department of Epidemiology National Institute for Minamata Disease Hama Minamata City ini berangkat ke Desa Buyat Pante didampingi dr Jan Speets dari WHO serta ahli kesehatan lingkungan pada Ditjen P2MPL

Depkes Suprianto dan Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2MPL Depkes Wan Alkadri.

Senin kemarin, Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar terkait penanganan kasus dugaan pencemaran Teluk Buyat. Menurut Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Dadang Garnida, pada intinya Menkes menegaskan bahwa penyelidikan kasus Buyat diserahkan sepenuhnya kepada Polri.

Secara teknis, Depkes dan Polri telah menetapkan masing-masing tugasnya untuk bekerja guna penuntasan kasus ini. Dari Depkes, yang ditunjuk

dr Nyoman, yang nantinya akan berkoordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri Brigadir Jenderal (Pol) Suharto.

Sementara itu, Departemen Kelautan dan Perikanan menyatakan siap memindahkan masyarakat nelayan di sekitar Teluk Buyat yang diduga tercemar logam berat merkuri atau air raksa (Hg). "Meski demikian, pemindahan penduduk tersebut hanya dilakukan apabila hasil koordinasi dengan instansi terkait menyatakan penduduk harus direlokasi dan penduduk pun setuju," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri di Cirebon, kemarin.

(TRI/ADP/DHF)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <b>AGST</b> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <b>10</b> 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 2 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

# Int'l Buyat study meets doubt

Abdul Khalik  
Jakarta

A Japanese expert on Minamata disease and an environmental expert from the World Health Organization (WHO) are conducting research in Buyat Pantai village in the North Sulawesi regency of Minahasa to determine whether metal poisoning reportedly causing the disease has occurred there.

A group of non-governmental organizations, however, consider the move an effort to whitewash the issue of pollution, saying it had already been determined from blood tests done on several Buyat residents that the mercury level could not cause Minamata disease.

The health ministry said on Monday that Mineshi Sa-

kamoto from the National Institute for Minamata Disease in Japan and WHO senior environmentalist Jan Speets were taking samples of fish and water, as well as blood, hair and nail clippings of residents for laboratory tests to be conducted in Japan.

In a press release made available to *The Jakarta Post*, the ministry said that two of its own environmental experts, Suprianto and Wan Alkadri, would participate in the research.

"Mineshi will be in Buyat until Aug. 11 before leaving for Jakarta on Aug. 12 and returning to Japan on Aug. 15. Besides taking samples, he will review and evaluate all previous tests," said Director General of Public Health Umar Fahmi.

He said the move was part of the ministry's attempt to

eliminate the possibility of Minamata disease.

Jakarta Health Agency laboratory tests conducted on blood samples taken from four Buyat residents on July 28 revealed that resident Rasyid Rahmat had the highest level of mercury at 52.50 micrograms per liter (ug/L), followed by Sri Fika Mod-eong, Juhria Ratumbahe and Masna Stjiman at 51.25 ug/L, 38.75 ug/L and 33.75 ug/L respectively.

Earlier, laboratory tests by MIPA UI showed that mercury levels in the blood of Sri Fika, Juhria, Masna and Rasyid stood at between 9.51 ug/L and 23.90 u/L.

WHO estimates that the average level of mercury content in humans normally stands at 8 ug/L, while in Minamata cases the level reaches between 300 and

500 u/L.

A number of NGOs, including the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), have acknowledged that the residents do not have Minamata disease.

However, they stressed that the high level of mercury and ailments the people were suffering indicated serious environmental contamination.

They said that rather than debating the existence of Minamata disease, the government should admit there has been contamination, find the source and seek ways to stop it.

Aside from facilitating the research, Umar also said the health ministry would finance the cost of living of all Buyat residents who were undergoing tests in Jakarta and would provide air tickets for their return home.

The ministry also suggested that other Buyat residents refrain from coming to Jakarta only for medication because the government had provided doctors with various expertise in their village to take care of them for free.

Earlier in the day, the National Police said they would cross-check the results of tests they are conducting with the findings of experts from MIPA UI, Sam Ratulangi University and several NGOs.

"We have heard that many tests have been conducted separately. The results cannot be used as legal evidence unless we accept them," said National Police deputy chief of detectives Insp. Gen. Dadang Garnida.

He said the police would complete their own tests later this week.

47

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <b>AGST</b> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 16 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

# Menkes, Kapolri Koordinasi dalam Tangani Kasus Buyat

JAKARTA (Media): Menteri Kesehatan Achmad Sujudi melakukan pertemuan koordinasi dengan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengenai penanganan kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara, kemarin.

Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Irjen Dadang Garnida, yang ditemui wartawan usai pertemuan tersebut, mengatakan salah satu hasil pertemuan adalah penunjukan dr Nyoman Kandun dari Depkes untuk membahas teknis penyelidikan kasus Buyat dengan Polri.

"Yang jelas berita acara itu akan diserahkan ke kita. Nanti kewajiban Polri adalah membuat berita acara tentang hasil penyelidikan oleh tim mereka untuk *projustitia*," katanya.

Namun, menurut Dadang, selain dengan Depkes, Polri juga perlu membentuk tim terpadu yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menangani kasus Buyat. Koordinasi terpadu itu, tambahnya, juga penting untuk mencegah pernyataan yang berbeda-beda antara satu departemen dan departemen lainnya yang bisa membahayakan masyarakat.

"Koordinasi ini mudah *diomongin*, tapi susah dilaksanakan. Tetapi kasus Buyat ini masalah nasional, bukan cuma masalah Polri, sehingga harus ditangani tim terpadu," tegas Dadang.

Dadang menyesalkan banyaknya pernyataan yang berbeda antardepartemen yang bisa menghambat proses penyelidikan. Padahal, tegasnya, jika koordinasi berjalan dengan baik, penyelidikan kasus Buyat bisa segera diselesaikan. Mantan Kapolda Jabar tersebut juga menyatakan hasil laboratorium pemeriksaan warga Buyat akan dijadikan acuan penyidik Polri.

#### Menkes bantah

Namun, dalam kesempatan yang sama Menkes Sujudi membantah bahwa pertemuan dengan Kapolri tersebut membahas koordinasi dalam penyelidikan kasus Teluk Buyat.

"Saya dengan Kapolri membahas masalah lain. Banyak kerja sama yang dilakukan Depkes dan Polri," elak Sujudi kepada pers.

Sujudi menyatakan pertemuan dengan Kapolri adalah penandatanganan kerja sama identifikasi korban meninggal (*death victim identification/DVI*).

"Ini sangat penting karena Indonesia kelihatannya masih lemah dalam masalah ini."

Ketika ditanya apakah permasalahan Teluk Buyat ikut dibicarakan, Menkes menyatakan tidak. Karena, hasil penyelidikan yang dilakukan tim terpadu belum selesai. "Soal Buyat? tidak ada itu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, empat warga Buyat telah mengadakan Menkes, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri ESDM ke Mabes Polri terkait kasus pencemaran di Teluk Buyat. Tiga menteri tersebut dinilai telah membohongi publik karena menyatakan tidak ada pencemaran di Teluk Buyat. Warga menuduh perusahaan tambang emas dari AS, PT Newmont Minahasa Raya, sebagai sumber pencemaran.

Di tempat terpisah di Jakarta, kemarin, Sujudi mengakui adanya kandungan merkurium (hg) dalam tubuh empat warga Buyat yang diperiksa di Jakarta, sebagaimana hasil penelitian oleh Fakultas MIPA UI beberapa waktu lalu. Namun, Sujudi belum berani menarik kesimpulan benar-tidaknya kandungan merkurium dalam darah empat warga itu yang diperiksa beberapa institusi lain.

Menkes juga menolak menanggapi hasil pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan kadar merkurium dalam darah empat warga itu jauh lebih tinggi daripada hasil penelitian FMIPA UI.

Penelitian FMIPA UI menyebutkan kadar merkurium dalam darah mereka melebihi ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 8 mikrogram/liter.

"Masih harus diteliti lebih lanjut, itu belum tentu karena pencemaran," ujarnya.

Sementara itu, RS St Carolus dan RS Cikini Jakarta, tempat warga Buyat diperiksa, mengatakan tidak dapat melakukan penelitian atas dampak pencemaran terhadap kualitas kesehatan masyarakat Buyat. Selain terkait ketiadaan alat analisis, hal itu juga karena rumah sakit tidak memiliki tenaga ahli dan peneliti khusus.

"Kami tidak dapat membuat pernyataan tentang kemungkinan keterkaitan antara pencemaran dan dampak kesehatan. Karena itu, fokus yang dilakukan di RS adalah mengobati," kata Kepala Humas RS St Carolus Endang Suryatno, kemarin.

Sejanda dengan itu, Kepala Humas RS Cikini Rosiana KS mengatakan pihaknya juga melakukan tindakan medis rutin, serta tidak akan membuat kesimpulan atas analisis kemungkinan dampak pencemaran. (Fud/Nuz/YD/X-7)

48

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 1	TAHUN 2004

# Menkes Akui Teluk Buyat Tercemar Merkuri

Jakarta, Sinar Harapan

Menteri Kesehatan (Menkes), Achmad Sujudi mengakui Teluk Buyat positif tercemar merkuri. Untuk itu ia mengajak semua pihak mengikuti proses hukum dan tidak dikontroversikan.

"Sekarang kita ikuti saja, kan ada proses hukum yang mengatur. Yang kelihatan saja dulu yang diobati, jangan dikontroversikan seperti ini. Ikuti saja proses hukum," kata Achmad Sujudi terburu-buru usai membuka Seminar Hak dan Kewajiban Masyarakat, Dokter dan Rumah Sakit Ditinjau dari Segi Hukum, Menyongsong Lahirnya UU Praktik Kedokteran, di Jakarta Senin (9/8) pagi.

Sementara itu sebelumnya, Sabtu (7/8) ia menyatakan siap melayani gugatan yang akan diajukan siapa pun, termasuk warga yang tinggal di sekitar Teluk Buyat. Gugatan tersebut diajukan karena keputusan Menkes yang menganggap penyakit yang diderita oleh warga di sekitar Teluk Buyat bukan minamata.

Menurut Menkes penyakit yang diderita oleh warga yang tinggal di sekitar Teluk Buyat memang bukan minamata.

"Tim dokter kami sudah melakukan pemeriksaan. Hasilnya memang bukan minamata. Itu penyakit biasa. Seperti penyakit kulit dan saluran pernafasan," kata Menkes.

Ditemui ketika menghadiri peringatan HUT ke-114 PT Bio Farma di Bandung, Sabtu (7/8), Menkes menegaskan pemeriksaan terhadap kesehatan warga Teluk Buyat tersebut dilakukan oleh tim dokter yang sebelumnya telah disumpah. Sehingga Menkes meyakini tim dokter tersebut bekerja dengan jujur.

Menkes bahkan balik bertanya kepada wartawan kalau hasil pemeriksaan disimpulkan bukan minamata, apakah harus dipaksakan sebagai minamata? Justru apabila penyakit yang diderita oleh warga sekitar Teluk Buyat itu tetap dianggap sebagai minamata, maka mereka akan menderita.

49

"Itu penyakit biasa. Jangan dibesar-besarkan sebagai minamata. Kasihan kan warga yang tinggal di sekitar Teluk Buyat. Tangkapan ikan mereka jadi tidak laku dijual," tegas Menkes. Menkes merasa kasihan dan prihatin dengan apa yang dialami oleh warga di sekitar Teluk Buyat.

#### **Kandungan Merkuri**

Diakui oleh Menkes dari hasil pemeriksaan memang ada kandungan merkuri dalam tubuh sejumlah warga. Hanya saja kandungan merkuri ini masih di bawah ambang batas yang membahayakan kesehatan mereka. Sama sekali tidak menyebabkan minamata.

Menkes bersikukuh hasil pemeriksaan tim dokter itu benar. Menurut Menkes dirinya memang kasihan dengan nasib warga Teluk Buyat. Tetapi kejujuran yang diungkapkan oleh tim dokter yang menyatakan bahwa mereka bukan mengidap penyakit minamata tetap harus dikedepankan.

Kalau bukan karena merkuri, lantas apa penyebab warga yang tinggal di sekitar Teluk Buyat menderita penyakit? "Tim kami tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin 2-3 bulan ke depan hasilnya baru diketahui. Apa yang menyebabkan sakit warga Teluk Buyat itu," jawab Menkes.

Terhadap mereka yang tidak puas kepada hasil pemeriksaan tim dokter dari Depkes, Menkes mempersilakan mengajukan gugatan. Tetapi Menkes tidak akan melakukan gugatan balik.

Menkes berjanji akan membiayai penyembuhan bagi warga Teluk Buyat yang kini berada di Jakarta. Sementara untuk mereka yang masih tinggal di sekitar Teluk Buyat, Depkes telah mengirim tim dokter berikut obat-obatan yang dibutuhkan.

Sementara itu Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Nabeli Makarim telah mengatakan bahwa pemerintah tidak menyembunyikan apa-apa dalam kasus Buyat sehubungan dengan adanya perbedaan interpretasi penelitian. "Percayai saya, pemerintah tidak punya maksud menyembunyikan apa-apa. Siapa yang salah dibawa ke pengadilan," kata Nabeli Makarim usai menghadap Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pemerintah tidak menyembunyikan apapun serta yang salah harus bertanggung jawab. Pernyataan Presiden menurut Nabeli, jelas.

Sebelumnya, Nabeli Makarim juga mengatakan bahwa didasarkan hasil penelitian instansinya, air laut di Teluk Buyat tidak tercemar serta kandungan Hg (air raksa) pada ikan masih di bawah baku mutu. Ia memang mengakui adanya keanehan dari fakta-fakta yang ada, yakni ada orang yang sakit dan ada ikan yang benjol, oleh sebab itu harus diketahui mengapa hal tersebut terjadi dan dicatat serta dicari ke mana arahnya.

Saat ini 15 warga Buyat berada di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena mereka menderita benjol-benjol di tubuh. Sebagian di antara mereka kini dirawat di RS St Carolus dan RS Cikini. Bahkan Laksmi mengalami sesak nafas sehingga minggu lalu dilarikan ke RS Cikini. (din/dio/ayu)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <b>AGST</b> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <b>10</b> 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HALAMAN : 12 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

# Kaltim Tak Mampu Penuhi Batubara Dunia

**SAMARINDA (Suara Karya):** Permintaan batubara melonjak, namun Kalimantan Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil "emas hitam" terbesar nasional itu tidak mampu memenuhinya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Batubara Indonesia Kaltim, Husien Akma, di Samarinda, Senin mengatakan, permintaan batubara oleh *buyer* dunia meningkat, namun daerah itu tidak mampu memenuhinya.

"Permintaan dunia akan batubara itu meningkat, diperkirakan akibat Cina sebagai salah satu negara produsen mengurangi kapasitasnya," kata Husien.

Oleh sebab itu, katanya, *buyer* batubara mengalihkan permintaannya kepada Kaltim sebagai salah satu produsen batubara terbesar nasional, namun sayangnya hal itu tidak dapat dipenuhi. Misalnya, belum lama ini, sebuah perusahaan raksasa dari Jepang mengajukan permintaan ke Kaltim, yakni Mitsubishi Cooperation sebesar satu juta ton/tahun.

Diperkirakan, perusahaan raksasa seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berlokasi di Sangatta (Kutai Timur) yang dikenal sebagai "Kabupaten Batubara" juga tidak mampu memenuhi permintaan itu.

"Ada beberapa faktor, mengapa perusahaan di Kaltim tidak mampu memenuhinya, karena sudah terikat kontrak dengan pembeli. Konsekuensinya apabila perusahaan memenuhi permintaan berarti mengurangi jumlah batubara yang dikirim kepada negara itu, padahal sudah terikat kontrak," kata Husien.

Konsekuensi lain untuk memenuhi permintaan --dengan catatan tidak mengganggu kontrak-- yakni meningkatkan produksi batubara. "Tetapi untuk meningkatkan produksi, tidak semudah membalik telapak tangan, karena butuh investasi yang luar biasa besarnya," ujar Husien.

Misalnya dalam meningkatkan produksi tersebut butuh alat-alat produksi. Padahal, satu jenis alat berat untuk kegiatan opera-

sional, satu unitnya mencapai Rp 10 miliar, sehingga untuk 10 unit saja butuh investasi Rp 100 miliar.

"Tingginya permintaan ini sebetulnya peluang besar bagi koperasi dan BUMD atau Perusahaan, namun sayangnya banyak badan usaha dalam bidang ini yang tidak profesional dalam arti mengutamakan faktor lingkungan," katanya.

Masalah lingkungan menjadi isu utama bagi negara-negara maju dalam membeli batubara ini. Sebelum mengadakan kontrak, pembeli dari negara-negara maju tersebut biasanya akan melihat pengelolaan lingkungan sebuah perusahaan.

"Persoalannya baik dalam investasi maupun pembelian batubara membutuhkan dana besar, sehingga mereka tidak ingin ketika uang yang ditanamkan menjadi sia-sia akibat terganjal oleh kampanye lingkungan hidup," ujarnya.

Berdasarkan data, kata Husien, dari total batubara di pasar dunia, hampir 10 persen adalah berasal dari *black market*, celakanya sebagian besar diduga dari Indonesia.

"Kesalahan ini akibat kebijakan bupati/walikota yang langsung mengeluarkan izin tanpa melihat kemampuan badan usaha itu, sehingga mereka mengeksploitasi batubara dengan mengabaikan bidang lingkungan," ujarnya.

Menangkap peluang tingginya permintaan batubara yang begitu besar, salah satu perusahaan batubara terkemuka di Indonesia, menargetkan produksinya mencapai 26 juta ton 2004 dan 30 juta ton untuk 2005.

Sudah tentu KPC sendiri tidak mampu memenuhinya, kata Husien sehingga target hanya bisa dicapai melalui dukungan kontraktor tambang. Misalnya untuk

2004, KPC hanya mampu memproduksi 13 juta ton/tahun, sisanya dipenuhi kontraktor tambang.

## Ekspor Ke Malaysia

Pada bagian lain diperoleh keterangan, batubara Indonesia memiliki peluang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan batubara Malaysia yang diperkirakan mencapai 20 juta ton per tahun pada tahun 2010.

"Batubara dari Indonesia potensial memenuhi kebutuhan di Malaysia khususnya Sabah," kata Datuk Mohammad Annas bin Mohammad Nur, Kepala

50

Komisi Energi Malaysia di sela-sela pertemuan bisnis tentang batubara dan pembangkit energi antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta, Senin.

Pertemuan yang dihadiri oleh pengusaha energi dari kedua negara itu diprakarsai oleh Indonesian Coal Society bekerjasama dengan BPPT dan Komisi Energi Malaysia.

Menurut Annas, kebutuhan batubara Malaysia saat ini 9-10 juta ton per tahun, diprediksikan akan naik sampai 20 juta ton per tahun pada 2010. Hal ini disebabkan karena pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengurangi pemakaian gas alam sebagai sumber energi.

Dewasa ini, pemanfaatan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit listrik, maupun industri lainnya mencapai 60-70 persen dan kecenderungannya akan terus diturunkan.

"Kami tidak dapat terus menerus pada sumber gas alam dan dalam empat tahun terakhir ini penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara terus meningkat," katanya.

Batubara hanya ditemukan di Serawak. Sehingga batubara dari Indonesia di Kalimantan dapat dimanfaatkan untuk PLTU batubara di Sabah. (Ant/W.I)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 10											TAHUN 2004																																	

■ Bisnis Batubara

## Indonesia Berpeluang Penuhi Kebutuhan Batubara Malaysia

### Jakarta, NERACA

Kebutuhan batubara Malaysia yang diprediksi mencapai 20 juta ton/tahun pada 201, bakal dipenuhi Indonesia. Peralnya, Malaysia lebih menginginkan Indonesia sebagai pemasok ketimbang negara lain.

"Kebutuhan Malaysia akan batubara saat ini mencapai 9 sampai 10 juta ton/tahun, dan diprediksi naik hingga 20 juta ton/tahun 2010. Karena itu batubara dari Indonesia sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan batubara di Malaysia, khususnya Sabah," kata Kepala Komisi Energi Malaysia Datuk Mohammad Anas bin Mohammad Nur, dalam pertemuan bisnis tentang batubara dan pembangkit energi, di Jakarta, kemarin.

Meningkatnya kebutuhan batubara Malaysia ungkap dia karena pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengurangi pemakaian gas alam sebagai sumber energi. "Pemanfaatan gas alam sebagai bahan bakar pembangkit listrik maupun industri lainnya mencapai 60-70% dengan kecenderungan akan terus diturunkan. Kami tidak dapat terus menerus bergantung pada sumber gas alam. Karena itu, dalam empat tahun terakhir ini

penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara terus meningkat," tuturnya.

Sedangkan persediaan batubara Malaysia saat ini lanjut dia, hanya ditemukan di negara bagian Serawak. "Untuk itu, batubara dari provinsi-provinsi Indonesia di Kalimantan dapat dimanfaatkan untuk PLTU batubara di Sabah," ujarnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM Yoga Pratomo mengatakan, cadangan batubara di Indonesia cukup untuk kebutuhan 50 tahun ke depan sehingga peningkatan ekspor batubara ke Malaysia sangat dimungkinkan.

Selain itu kata dia, permintaan energi di Kalimantan pertumbuhannya tidak setinggi di Sabah. "Indonesia dengan produksi mencapai lebih dari 100 juta ton/tahun merupakan sumber daya energi yang sangat potensial bagi Malaysia," katanya.

Saat ini volume ekspor batubara Indonesia ke Malaysia mencapai 2,5 juta ton/tahun. Selain Indonesia, Malaysia juga mengimpor batubara dari Australia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengalaman yang cukup lama dalam

operasional PLTU berbahan bakar batubara seperti PLTU Suralaya dan Paiton.

Sebelumnya, Direktur Sumber Daya Mineral dan Pengembangan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Mahyudin Lubis mengungkapkan, membaiknya harga batubara di pasar internasional akan mendorong produksi batubara nasional. Karena itu ia memperkirakan, produksi batubara nasional pada 2004 ini bisa mencapai 135 juta ton.

"Target sebesar itu bukan hanya karena harga batubara cukup bagus di pasar internasional, tetapi target itu juga didasarkan atas program kerja yang diajukan sejumlah produsen atau kontraktor batubara pada 2004 ini," katanya, baru-baru ini.

Diakui, pihaknya memang memiliki rencana untuk memproduksi mencapai 135 juta ton pada tahun ini. "Diharapkan bisa didapat dari sejumlah lahan yang sudah ada dengan menggenjot produksinya," kata Mahyudin.

Meski begitu, Mahyudin tidak menjelaskan secara detil target tersebut akan dicapai. Ia hanya mengungkapkan, Bumi Resources sebagai pemilik PT Kaltim Prima Coal (KPC) direncanakan dapat

meningkatkan produksinya sebesar 40% menjadi 43 ton. "Beberapa perusahaan lainnya juga meningkatkan produksinya," ujarnya.

Produksi batubara Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan dan pada 2003 mencapai 112 juta ton. Seperti dikatakan Mahyudin, pada 2004 produksi batubara diproyeksikan akan meningkat menjadi 135 juta ton.

Dari jumlah produksi itu, 86% berasal dari kontraktor PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi I-III.

Sementara PT (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam (PT-BA) memproduksi kurang dari 10% dari total produksi itu dan sisanya diproduksi oleh perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Sebagian besar produksi itu atau 67,5% digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke berbagai negara terutama di kawasan Asia Pasifik, seperti Jepang, Taiwan, Korea dan negara ASEAN. Sisanya sebesar 31 juta ton (32,5%) digunakan untuk keperluan di dalam negeri antara lain untuk pembangkit listrik, pabrik semen, industri pulp, dan lainnya. (zan)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL <b>AGST</b> SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <b>10</b> 11 12 13 14 15 16    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 24 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

**Pengelolaan Air Tanah tidak Adil**

**P**ENGELOLAAN dan pemanfaatan air tanah di beberapa kota besar di Indonesia saat ini cenderung tidak berkeadilan. Pemihakan masih bagi orang-orang mampu, sementara rakyat miskin justru banyak dirugikan. "Air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) misalnya, saat ini baru bisa dinikmati orang-orang yang mampu dengan harga sangat murah. Sementara masyarakat miskin harus membeli air bersih dengan cara eceran, dengan harga yang cenderung mahal," tutur Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Simon F Sembiring di Bandung beberapa waktu lalu.

Simon mengungkapkan, kesulitan terhadap pasokan air tanah tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga sudah menyebar ke desa-desa. Hal itu menjadi persoalan yang rumit sehingga harus ada toleransi dan kekompakan di masyarakat untuk bisa menuntaskannya.

Penyebab kesulitan air, lanjutnya, karena adanya persoalan sejak dari hulu hingga ke hilir. Di hulu, sumber air menjadi terbatas karena penggundulan hutan, sedangkan di hilir terjadi konflik antar komunitas karena air bersih yang berkurang. "Karena itu, kita mengharapkan setiap daerah membuat peraturan tentang pengelolaan air tanah ini. Diharapkan, dengan adanya aturan yang mengikat akan menekan gangguan terhadap kelestarian air bersih." (Sg/Em/V-2)